

## MA Tolak Kasasi Suteki terkait Jadi Saksi Ahli HTI

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Prof Suteki yang melawan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Suteki tidak terima dirinya dicopot dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kaprosi MIH) Undip dengan alasan dirinya menjadi saksi ahli Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di persidangan.

Kasus bermula saat Suteki menjadi saksi ahli di PTUN Jakarta dari kubu HTI. Otomatis, pendapatnya menguatkan argumen HTI. Mengetahui hal itu, Rektor Undip mengambil langkah dengan memeriksa Suteki pada Juni 2018. Sebab, HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tetapi Suteki masih menjadi saksi ahli. Akhirnya, Rektor Undip Prof Yos Johan Utama mencopot Suteki dari jabatannya sebagai Kaprosi MIH mulai tanggal 6 Juni 2018 karena melakukan pelanggaran berat.

Suteki tidak diam dan mengambil langkah hukum. Gugatan dilayangkan ke Pen-

adilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan meminta SK pencopotan dirinya dicabut. Namun apa daya, gugatan itu kandas. Pada 11 Desember 2019, PTUN Semarang menolak gugatan Suteki untuk seluruhnya. Sebab apa yang dilakukan Rektor Undip atas Suteki adalah bentuk pembinaan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Suteki lagi-lagi tidak terima. Ia melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Surabaya. Tapi upayanya menemui jalan buntu. Pada 29 April 2020, PT TUN Surabaya menguatkan putusan PTUN Semarang. Duduk sebagai majelis tinggi yaitu Ariyanto, Achmad Hari Arwoko dan Sastro Sinuraya.

Apakah Suteki menerima? Profesor yang telah puluhan tahun menjadi dosen itu memilih melayangkan kasasi. "Tolak kasasi," demikian bunyi amar kasasi yang dilansir website MA, Selasa (22/12).

Sebagai ketua majelis Hary Djatmiko dengan anggota Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono. ■ pan

## Kemenko PMK Sebut 50% Tenaga Kerja Butuh Peningkatan Kemampuan

JAKARTA (IM) - Sebanyak 50 persen tenaga kerja yang ada saat ini membutuhkan peningkatan dan pelatihan kemampuan untuk menghadapi situasi dunia kerja yang berkembang dengan digitalisasi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, penyesuaian kompetensi dengan teknologi baru sangat dibutuhkan oleh para pekerja agar tak tertinggal. Pasalnya, menurut publikasi World Economic Forum: Future of Jobs Report tahun 2020, diprediksi 84 persen pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin-mesin canggih.

"50 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomatisasi. Untuk mengatasi situasi itu setidaknya 50 persen pekerja yang ada saat ini membutuhkan re-skilling dan upskilling," ujar Agus dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Selasa (22/12).

Ia mengungkapkan, kondisi seperti itu akan mem-

buat porsi pekerjaan yang masih dilakukan manusia berkurang dari 67 persen menjadi 53 persen dalam lima tahun mendatang. Bahkan, diperkirakan 85 juta lapangan pekerjaan yang ada saat ini pun akan hilang.

"Perlu kita cermati pekerjaan hilang bukan berarti pengangguran, namun artinya ada peluang baru. Dalam lima tahun mendatang, diperkirakan ada 97 juta pekerjaan baru yang merupakan kombinasi atau hybrid antara manusia, mesin, dan komputer," kata Agus.

Oleh karena itu, ia pun berharap seluruh individu saat ini mulai bisa menyesuaikan kompetensinya dengan teknologi baru. Termasuk menguasai kemampuan sains, teknologi, hingga internet of things. Perubahan menuju ke arah itu, sudah mulai terlihat di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Pandemi, kata Agus, telah membawa dampak perubahan terhadap sistem kehidupan manusia. Salah satunya aktivitas sehari-hari yang semula dilakukan manual dan langsung, kini bersifat daring dan digital. ■ osm

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## PEMERIKSAAN HERMANSYAH HAMIDI

Tersangka Kepala Dinas PUPR Kab Lampung Selatan (2016 - 2017) Hermansyah Hamidi (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Hermansyah Hamidi diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan terlibat korupsi terkait fee pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016 dan 2017.

# NasDem ke 6 Menteri Baru: Tidak Boleh Punya 'Agenda' Sendiri

"Kita berharap agar menteri yang baru lebih baik, figur yang bersih dan memiliki komitmen kuat untuk membantu Presiden dalam memajukan bangsa dan negara. Semua menteri tidak boleh punya agenda sendiri, tetapi total melaksanakan visi, misi dan program Presiden-Wakil Presiden," sebut Charles Meikyansah.

JAKARTA (IM) - Partai NasDem meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan yang matang dalam menunjuk enam menteri yang baru diperkenalkan Selasa sore kemarin. Satu pesan NasDem untuk keenam menteri baru tersebut, yakni laksanakan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

"Penggantian dan pemberhentian menteri merupakan

hak prerogatif Presiden. Presiden kapan saja bisa mengganti menteri yang dinilai berkernya tidak maksimal. Tentu Presiden memiliki catatan mengenai kinerja setiap menteri dalam setahun usia kabinet ini, sehingga tahu persis menteri mana yang perlu diganti," kata Ketua DPP NasDem Charles Meikyansah, kepada wartawan, Selasa (22/12).

Charles mengatakan, Nas-

Dem berharap agar enam menteri baru ini merupakan figur yang 'bersih'. NasDem mengingatkan keenam menteri yang baru ini tidak boleh memiliki agenda sendiri, selain melaksanakan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

"Kita berharap agar menteri yang baru lebih baik, figur yang bersih dan memiliki komitmen kuat untuk membantu Presiden dalam memajukan bangsa dan negara. Semua menteri tidak boleh punya agenda sendiri, tetapi total melaksanakan visi, misi dan program Presiden-Wakil Presiden," sebut Charles

Lebih lanjut, Charles meminta agar para menteri baru ini segera menjalankan program-program yang tertunda di kementerian masing-masing. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem ini juga meminta keenam menteri yang baru

totalitas menjalankan amanah. "Waktu Jokowi tinggal empat tahun, yang mana tahun pertama dilewati dalam badai pandemi Covid-19. Empat tahun ke depan harus menjadi 'tahun-tahun ajaib' untuk menggenjot semua program

yang tertunda. Tidak ada cara lain kecuali Jokowi membuktikan para pembantu yang all out bekerja tanpa punya niat sedikit pun untuk korupsi, tahun ke depan harus menjadi 'tahun-tahun ajaib' untuk menggenjot semua program

## Budi Gunadi, Insinyur Pertama yang Menjabat Menteri Kesehatan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah me-resuffle jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ada enam orang menteri baru yang diumumkan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Keenamnya dilantik Jokowi, hari ini Rabu (23/12) pagi.

"Pelantikan akan dilaksanakan Rabu pagi," ujar Jokowi di Istana Merdeka usai mengumumkan reshuffle kabinet, Selasa (22/12).

Salah satu nama yang mengisi kursi menteri Jokowi adalah Budi Gunadi Sadikin. Ia menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan (Menkes). Namun, Budi diketahui bukan berlatarbelakang dari bidang kesehatan seperti Terawan.

Budi G Sadikin merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendampingi Menteri Erick Thohir mengembangkan ratusan perusahaan pelat merah. Pria kelahiran 8 Juli 1964 itu sebelumnya pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri.

Budi merupakan satu-satunya menteri kesehatan yang mempunyai latar belakang insinyur. Jokowi pun belum menjelaskan alasannya menunjuk Budi sebagai Menkes. Namun Budi ikut andil dalam proses berburu vaksin Covid-19 untuk Indonesia.

Budi merupakan lulusan sarjana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bidang Fisika Nuklir pada 1988. Setelah itu, dirinya juga menempuh sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (CHFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada 2004.

Dirinya juga mengikuti berbagai program seperti 'Strategic Thinking and Management for Competitive Advantage Program' dari Wharton University of Penn-

sylvania pada 2008, dan sebagai program lainnya hingga 'Executive Education Risk Management in Banking' dari INSEAD pada 2012.

Karir Budi dimulai pada 1988, dengan menjadi Staff Teknologi Informasi di IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang. Kemudian dipindah ke IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Systems Integration and Professional Services Manager.

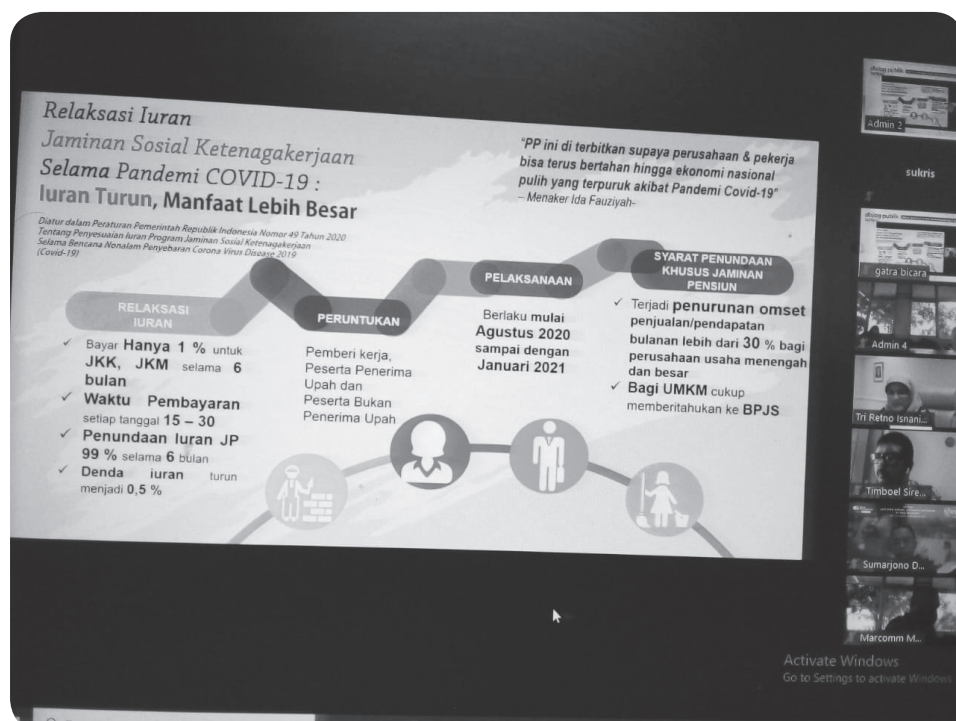
Setelah itu, Budi melanjutkan karirnya di berbagai bank, mulai dari Bank Bali pada 1994 dengan beberapa jabatan diantaranya sebagai General Manager Electronic Banking hingga Chief General Manager Human Resources sampai pada 1999.

Kemudian bergabung dengan ABN Amro Bank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Consumer dan Commercial Banking (Senior Vice President), untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia hingga 2004.

Lalu pindah ke Bank Danamon dan menjabat Executive Vice President Consumer Banking, juga pernah menjadi Direktur di Adira Quantum Multi Finance. Kemudian Budi bergabung di Bank Mandiri sebagai Direktur Micro and Retail Banking.

Pada 2013 Budi diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga 2016. Lalu pada 2016, dirinya ditunjuk menjadi Staff Khusus Menteri BUMN, dan aktif menjadi Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Fintech Indonesia sebelum akhirnya mendampingi Erick. ■ dot

## Masa Pandemi Covid-19, Klaim di BPJamsostek Hingga Oktober 2020 Capai Rp30,52 Triliun



JAKARTA (IM) - Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari risiko sosial ekonomi.

Sementara itu, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya pemberi kerja yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian pekerjanya atau bahkan menutup usahanya.

Menurut data BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan, sejak Maret lalu tercatat 3,5 juta pekerja yang mengalami PHK, sehingga total pengangguran yang ada di Indonesia kini bertambah menjadi 10,3 juta orang.

Hal tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap jumlah klaim di BPJamsostek yang turut meningkat.

"Hingga Oktober 2020, jumlah peserta yang telah melakukan klaim tercatat sebanyak 2,49 juta kasus atau meningkat sebesar 20 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan total nominal Rp30,52 triliun atau meningkat 18 persen," kata Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK

Sumarjono dalam Webinar Peranan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Era Pandemi, Selasa (22/12).

Selain Sumarjono, webinar tersebut juga menghadirkan pembicara Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dan Keynote Speaker Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tri Retno Isnainingsih, Sh, M.Si.

Menghadapi kondisi tersebut, sambung Sumarjono, sejak Maret lalu BPJamsostek telah memperkenalkan protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) melalui kanal hibrid yaitu online, offline dan kolektif.

Untuk kanal online, peserta dapat mengajukan klaim dengan cara mengakses antaran.bpjsketenagakerjaan.go.id. Namun bagi peserta yang mengalami kendala saat menggunakan Lapak Asik online, BPJamsostek juga membuka kanal onsite yang tersedia di kantor cabang BPJamsostek di seluruh Indonesia, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Menurut Sumarjono, peningkatan kapasitas melalui Lapak Asik ini berhasil mendapatkan respon positif dari para peserta dan stakeholder.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan

berbagai upaya guna menekan jumlah PHK dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, diantaranya dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja serta relaksasi iuran BPJamsostek bagi para pemberi kerja.

Dalam mendukung program pemerintah tersebut, BPJamsostek selalu berperan aktif diantaranya dengan menjadi mitra penyedia data calon penerima BSU yang merupakan peserta BPJamsostek.

Kembali Sumarjono mengatakan, untuk program relaksasi iuran, BPJamsostek memberikan keringanan iuran di antaranya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99%, penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 99%, relaksasi batas akhir waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 di bulan berikutnya serta relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2% menjadi 0,5% untuk semua program.

Masa relaksasi berlaku 6 bulan dimulai Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021.

Dengan berbagai insentif pemerintah tersebut, diharapkan ekonomi Indonesia dapat segera bangkit sehingga lapangan pekerjaan kembali terbuka dan penyerapan tenaga kerja terus meningkat. ■ kris



## PEMERIKSAAN IIS ROSITA DEWI

Anggota DPR Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi (tengah) saat tiba sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/12). Iis Rosita Dewi dimintai keterangan terkait suap yang menjerat suaminya yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait penetapan dan perizinan calon Eksportir benih Lobster (benur), pengelolaan perikanan atau komoditas perairan lainnya tahun 2020.

## Komisi VIII DPR Sebut Yaqut Cholil Qoumas Pantas Jadi Menag

JAKARTA (IM) - Yaqut Cholil Qoumas dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama (Menag). Komisi VIII DPR RI menyampaikan selamat terhadap Ketum GP Ansor itu.

"Selamat untuk Gus Yaqut Cholil Qoumas yang dipercaya menjadi Menteri Agama RI," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (22/12).

Ketua DPP Golkar itu menilai Yaqut Cholil Qoumas layak menduduki posisi Menag. Ace berharap pandangan Yaqut Cholil Qoumas terkait keagamaan dapat mencairkan moderasi dalam beragama.

"Beliau pantas menduduki jabatan tersebut karena pandangan keagamaannya diarahkan mencairkan moderasi beragama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ace menyebutkan sudah mengenal sosok Ketum GP Ansor itu. Menurutnya, Yaqut Cholil Qoumas telah berhasil membina organisasi yang konsisten menjaga beragama di Indonesia.

"Saya mengenalnya dengan sangat baik sebagai

sesama Ketua GP Ansor pada periode sebelumnya. GP Ansor selama ini telah menunjukkan pandangannya sebagai organisasi yang konsisten merawat beragama di Indonesia

Di tempat terpisah Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau akrab disapa Cak Nanto mengucapkan selamat kepada Yaqut Cholil Qoumas. "Selamat untuk Gus Yaqut, semoga amanah dan mampu mengayomi kebinnekaan umat," ujar Cak Nanto kepada wartawan.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti posisi Menteri Agama RI. Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk menjadi Menteri Agama RI.

"Yang keempat Yaqut Cholil Qoumas. Akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama," kata Presiden Jokowi dalam pengumuman menteri baru di Istana Merdeka, Selasa (22/12).

Yaqut Cholil Qoumas saat ini berstatus anggota DPR RI. Dia menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. ■ han

**PENGUMUMAN**

PT. AKR SURABAYA LAND CORPORINDO, berkedudukan di Kota Surabaya, (Perseroan), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 30 Nopember 2020 Nomor 1324, yang dibuat dihadapan WIDYA AGUSTYNA, SH, Notaris di Kabupaten Tanggerang, telah dilakukan Konversi atas hutang Perseroan kepada PT ARTHAKENCANA RAYATAMA, sebesar Rp. 20.000.000.000,- menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.

Surabaya, 23 Desember 2020  
Direksi  
PT. AKR SURABAYA LAND CORPORINDO

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OCEAN BUANA LINES, tertanggal 18 Desember 2020 Nomor 03, dibuat dihadapan NI PUTU SRI SUNARDEWI, SH, Notaris di Depok, seluruh pemegang saham Perseroan memutuskan:

I. Memberikan persetujuan perbaikan nilai nominal saham Perseroan dalam database Administrasi Hukum Umum, dari semula tertulis Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

II. Memberikan persetujuan perbaikan modal dasar dan modal ditempatkan dalam database Administrasi Hukum Umum dari semula tertulis sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Desember 2020  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT PROTEINDO SARANA UTAMA berkedudukan di Kabupaten Pasuruan (Perseroan), nomor 32, tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui dan diputuskan sebagai berikut:

Persetujuan untuk pengurangan modal dasar perseroan semula Rp. 100.000.000.000,- menjadi Rp. 30.000.000.000,- dan pengurangan modal disetor dari Rp. 50.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000.000,- dengan cara penarikan kembali saham Perseroan dari PT Sarana Proteindo Utama.

Barang siapa yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan, PT Proteindo Sarana Utama Wangkal Wetan Keljayan Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 67172 Pasuruan, 23 Desember 2020  
Direksi Perseroan, PT Proteindo Sarana Utama

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan GOODWILL INDONESIA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat ("Yayasan") tertanggal 21 Desember 2020, para pembina Yayasan telah membubarkan Yayasan dan menunjuk Tuan THOMAS SUGITO sebagai Likuidator.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diumumkan kepada seluruh kreditor, debitur dan Pihak ketiga untuk menyelesaikan seluruh masalah utang piutang Yayasan dan sanggahan atau keberatan dengan menghubungi Likuidator secara tertulis di alamat Komplek Duta Merlin Blok E No. 10 Lantai 3, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Petojo Utara - Gambir, Jakarta Pusat.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Desember 2020  
Likuidator